

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

PDM Kota Yogyakarta secara formal mengatakan netral, namun sikap tersebut tidak diikuti dengan surat pernyataan yang resmi bahwa PDM Kota Yogyakarta netral di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Kemudian, PDM Kota Yogyakarta mengartikan netralitas lebih kepada bagaimana menjaga “kedekatan yang sama”, artinya PDM mencoba untuk tidak mengambil jarak kepada siapapun dan memberikan ruang kedekatan baik bagi pasangan calon Imam-Fadli maupun Haryadi-Heroe. Dengan begitu PDM mampu bermanuver dalam kepentingan-kepentingan politik yang dimiliki.

Kemudian, bentuk netralitas yang diwujudkan PDM Kota Yogyakarta adalah tentang keberpihakan kepada suatu nilai, bahwa ada suatu nilai yang harus dipilih lalu kemudian diperjuangkan. bahkan Ashad selaku pimpinan mengungkapkan jika netralitas itu sebenarnya tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Manusia harus dihadapkan pada suatu pilihan, jika dicontohkan pilihan antara baik dan buruk, maka manusia harus memilih salah satu nya. Ketika sudah memilih salah satunya, maka pilihan tersebut harus diperjuangkan. PDM Kota Yogyakarta memang berpihak kepada salah satu calon, PDM juga mendukung calon tersebut di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, dengan alasan pasangan calon merupakan kader Muhammadiyah, dan memiliki kultur yang sangat dekat dengan Muhammadiyah. Kemudian, dengan landasan rekomendasi Musyda, PDM Kota Yogyakarta juga

mengarahkan warganya untuk memilih pemimpin yang cerdas dan memiliki kedekatan kultur dengan Muhammadiyah. Kandidat pasangan calon yang mendapatkan dukungan dari PDM di Pilkada Kota Yogyakarta 2017 adalah pasangan Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi.

Menguji netralitas PDM Kota Yogyakarta tidak hanya dilihat dari sudut pandang bagaimana PDM mengartikan netralitas dan mewujudkan netralitasnya di Pilkada Kota Yogyakarta. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat mengukur netralitas politik PDM Kota Yogyakarta di Pilkada Kota Yogyakarta. *Pertama*, Sikap tidak secara aktif mendukung salah satu kandidat. Pada aspek ini jelas bahwa PDM Kota Yogyakarta mendukung salah satu calon yaitu pasangan calon Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi, sehingga aspek ini menyimpulkan PDM tidak netral. *Kedua*, Tidak menjadi tim sukses salah satu kandidat. Pada aspek ini PDM Kota Yogyakarta memang tidak terlibat secara langsung, akan tetapi melalui kader-kadernya yang menjadi tim sukses mampu menyambungkan komunikasi politik PDM dengan pasangan calon Haryadi-Heroe, sehingga di aspek ini pun PDM belum bisa dikatakan netral.

*Ketiga*, Tidak memiliki kepentingan politik. Pada aspek ini PDM Kota Yogyakarta memang tidak nampak memiliki tawaran dan kesepakatan dengan pasangan calon, akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadikan PDM termasuk di dalam kelompok yang memiliki kesepakatan politik, seperti masuknya salah satu pimpinan menjadi staff ahli Walikota, dan beberapa kepentingan lainnya seperti program dan kebijakan yang dibuat pemerintah

juga harus mendukung persyarikatan dan dakwah Muhammadiyah di segala bidang. Dengan begitu, pada aspek ini PDM Kota Yogyakarta juga belum bisa dikatakan netral sepenuhnya.

Jika disimpulkan dari aspek yang menguji netralitas PDM Kota Yogyakarta di Pilkada Kota Yogyakarta, maka PDM tergolong pada situasi yang tidak netral karena tidak memenuhi beberapa aspek netralitas di atas. Dengan begitu, meskipun PDM Kota Yogyakarta mengatakan bahwa secara formal PDM Kota Yogyakarta netral, dan sikap tersebut juga tidak diikuti dengan surat pernyataan, maka apabila di uji lebih dalam menggunakan aspek di atas, PDM Kota Yogyakarta termasuk didalam kategori yang tidak netral.

Kemudian melalui pengamatan penulis, terdapat temuan yang dapat menggambarkan bentuk netralitas PDM Kota Yogyakarta didalam melakukan aktivitas politiknya. Pertama, netralitas aktif. Kedua, netralitas semu. Ketiga, netralitas pasif. Dari ketiga kategori netralitas tersebut, yang mencerminkan atau menggambarkan bentuk netralitas PDM Kota Yogyakarta adalah netralitas semu, hal tersebut didasari oleh temuan-temuan dilapangan yang mengatakan bahwa PDM Kota Yogyakarta secara formal netral, akan tetapi didalam praktiknya PDM Kota Yogyakarta tidak netral, sedangkan semu secara bahasa diartikan sebagai suatu wujud yang terlihat seperti asli, akan tetapi sebenarnya tidak asli. Dengan begitu bentuk netralitas yang tepat untuk menyebut netralitas PDM adalah netralitas semu, yang artinya bahwa sikap netral PDM Kota Yogyakarta memang diiringi dengan sikap aktif terlibat dan

berpihak didalam mendukung salah satu calon yaitu Haryadi-Heroe di Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Beberapa potret netralitas politik Muhammadiyah menyimpulkan bahwa didalam studi kasusnya PDM Kota Yogyakarta pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017 belum bisa dikatakan netral, bahkan tergolong dikategori tidak netral. Ketidaknetralan Muhammadiyah bukan berarti memiliki afiliasi dengan partai politik atau beraktivitas seperti partai politik, akan tetapi keberpihakan dukungan yang sangat terlihat kepada salah satu calon yaitu Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi di Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Netral atau tidaknya PDM Kota Yogyakarta, tetap memiliki nilai yang diperjuangkan untuk persyarikatan, dan menggerakkan roda persyarikatan untuk selalu berkembang dan selalu menggaungkan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Muhammadiyah dalam hal ini PDM Kota Yogyakarta alangkah lebih baiknya memberikan keterangan secara resmi di Pilkada Kota Yogyakarta 2017, apakah mendukung salah satu calon ataukah netral dan tidak mendukung siapapun. karena menjadi dilematis ketika tidak menyatakan sikap secara resmi, melihat organisasi Muhammadiyah yang selama ini dikenal dengan netralitasnya, ketika dibenturkan pada

kasus Pilkada Kota Yogyakarta 2017 PDM Kota Yogyakarta ternyata tidak netral .

2. Muhammadiyah harus memiliki sikap atau pendirian yang kuat dalam berhubungan dengan politik, karena terkadang sikap yang diberikan Muhammadiyah secara organisatoris tidak satu pintu atau berbeda-beda, jika Pimpinan Pusat mengatakan netral terdapat perbedaan di beberapa Pimpinan-Pimpinan di wilayah ataupun daerah-daerah yang menerapkan tidak netral dalam berpolitik.
3. Sebenarnya tidak menjadi permasalahan ketika Muhammadiyah memang tidak bersikap netral, atau secara terang-terangan mengatakan tidak netral pada era demokrasi sekarang ini, karena Muhammadiyah memang harus terlibat dalam menciptakan pemimpin muslim yang islami supaya mampu memberikan kemajuan pada bangsa Indonesia.
4. Penelitian yang saya lakukan mungkin banyak kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu harus ada penelitian selanjutnya yang membahas tentang politik Muhammadiyah atau netralitas politik Muhammadiyah di beberapa daerah di Indonesia. Supaya menjadi wawasan dan khasanah keilmuan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.